



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 53 TAHUN 2014

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM MANAJEMEN PERUBAHAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Manajemen Perubahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa Pejabat/Pegawai yang tertera pada lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Program Sponsor, Advisor, Program Manager, Project Manager, Design Manager, Change Manager, Quality Assurance Manager, Koordinator dan Anggota pada Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Manajemen Perubahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Manajemen Perubahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM MANAJEMEN PERUBAHAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

KESATU : Menetapkan Tim Manajemen Perubahan dan Tim Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Manajemen Perubahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. *Program Sponsor* memberikan arah kebijakan pelaksanaan Manajemen Perubahan;

- b. *Advisor* melakukan pengawasan, memberikan masukan dan pertimbangan-pertimbangan dalam rangka menjaga komitmen lembaga terhadap Manajemen Perubahan;
- c. *Program Manager* bertanggung jawab untuk seluruh pelaksanaan program Manajemen Perubahan, mengelola resolusi konflik, dan berkoordinasi serta berkomunikasi dengan para Pihak;
- d. *Project Manager* mengelola program Manajemen Perubahan sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasinya;
- e. *Design Manager* menyusun desain teknis program Manajemen Perubahan;
- f. *Change Manager* melakukan persiapan teknis, pengembangan dan pelaksanaan program Manajemen Perubahan; dan
- g. *Quality Assurance Manager* memastikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program serta melaksanakan pemeriksaan kepatuhan realisasi terhadap perencanaan.

KETIGA : Tim Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun strategi pencapaian program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. melaksanakan program dan kegiatan yang terlingkup dalam Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- c. mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Program dan kegiatan yang harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab koordinator dan anggota Tim tercantum di dalam dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 127 Tahun 2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 129 Tahun 2011 tentang Manajemen Perubahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Maret 2014

**KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM REFORMASI
BIROKRASI DAN TIM MANAJEMEN
PERUBAHAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR : 53 TAHUN 2014

TANGGAL : 10 Maret 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM
MANAJEMEN PERUBAHAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

POSISI	NAMA	JABATAN STRUKTURAL
Program Sponsor	Agus Rahardjo	Kepala LKPP
Advisor	Eiko Whismulyadi	Sekretaris Utama
Program Manager	Himawan Adinegoro	Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
	Robin Asad Suryo	Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi
	Agus Prabowo	Deputi Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
	Ikak Gayuh Patriastomo	Deputi Bidang Hukum dan Sanggah
Project Manager	Salusra Widya	Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
	Dade Nursahid AY	Kepala Biro Umum dan Keuangan

POSISI	NAMA	JABATAN STRUKTURAL
	Dharma Nursani	Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
	Setya Budi Arijanta	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
	Emin Adhy Muhaemin	(Plt) Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
	Gusmelinda Rahmi	(Plt) Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
	Tatang Rustandar W	(Plt) Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
	Fadli Arif	Direktur Pengembangan Sistem Katalog
	Tatang Rustandar W	Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
	Sarah Sadiqa	(Plt) Direktur Pengembangan Profesi
	Sarah Sadiqa	Direktur Pelatihan Kompetensi
	Gusmelinda Rahmi	Direktur Sertifikasi Profesi
	Reifeldi	Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I
	Rita Berlis	Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II
	Fendy Dharma Saputra	Direktur Penanganan Permasalahan Hukum
Design Manager	Ida Poespita	Kepala Bagian Organsiasi dan Tata Laksana
	Iwan Herniwan	Kepala Bagian Program dan Anggaran
	Windy Dian Trisari	Kepala Subbagian Pengadaan dan Mutasi

POSISI	NAMA	JABATAN STRUKTURAL
Change Manager	Raden Ari Widiyanto	Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
	Selamet Budiharto	Kepala Bagian Sistem Informasi
	M. Aris Supriyanto	Kepala Subdirektorat Barang dan Jasa
	Hermawan	Kepala Subdirektorat Pengelolaan dan Pembinaan LPSE
	Hafiz Ashadi	Kepala Subdirektorat Tata Kelola dan Evaluasi Sertifikasi
	Zulhenny	Kepala Subdirektorat Penanganan Permasalahan Kontrak
Quality Assurance Manager	Hardi Afriansyah	Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi
	Tjipto Prasetyo N	Kepala Bagian Keuangan
	Nanang Priyatna	Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi

B. TIM REFORMASI BIROKRASI

1. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

POSISI	NAMA	JABATAN STRUKTURAL
Koordinator	Setya Budi Arijanta	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
Anggota	Emin Adhy Muhaemin	(Plt) Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
	Gusmelinda Rahmi	(Plt) Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
	Raden Ari Widiyanto	Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
	M. Aris Supriyanto	Kepala Subdirektorat Barang dan Jasa
	Fanni Sufiandi	Kepala Subdirektorat Jasa Konstruksi
	GAA Diah Ambarawaty	Kepala Subdirektorat Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha

2. PENATAAN PENGUATAN ORGANISASI

POSISI	NAMA	JABATAN STRUKTURAL
Koordinator	Salusra Widya	Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
Anggota	Ida Poespita	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
	Katriasih Dwi H	Penyusun Bahan Ketatalaksanaan

3. PENATAAN TATA LAKSANA

POSISI	NAMA	JABATAN STRUKTURAL
Koordinator	Dharma Nursani	Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
Anggota	Ida Poespita	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
	Selamet Budiharto	Kepala Bagian Sistem Informasi
	Patria Susantosa	Kepala Subdirektorat Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi

4. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

POSISI	NAMA	JABATAN STRUKTURAL
Koordinator	Dharma Nursani	Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
Anggota	Windy Dian Trisari	Kepala Subbagian Pengadaan dan Mutasi
	Adreng Kusuma A	Penelaah Bahan Pengadaan dan Mutasi
	Yohana Surat Payon Philip	Calon Analis Kepegawaian

5. PENGUATAN PENGAWASAN

POSISI	NAMA	JABATAN STRUKTURAL
Koordinator	Dade Nursahid AY	Kepala Biro Umum dan Keuangan
Anggota	Tjipto Prasetyo Nugroho	Kepala Bagian Keuangan

POSISI	NAMA	JABATAN STRUKTURAL
	GAA Diah Ambarawaty	Kepala Subdirektorat Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha
	Arif Budiman	Kepala Subbagian Verifikasi Anggaran
	Devi Yanurida	Bendaharawan
	Disty Putri A	Pengolah Data Bahan Penyusunan Anggaran

6. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

POSISI	NAMA	JABATAN STRUKTURAL
Koordinator	Salusra Widya	Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
Anggota	Hardi Afriansyah	Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi
	Iwan Herniwan	Kepala Bagian Program dan Anggaran
	Tri Susanto	Pengolah Data Pemantauan
	Firmansyah	Pengolah Data Penyusunan Rencana dan Program

7. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

POSISI	NAMA	JABATAN STRUKTURAL
Koordinator	Tatang Rustandar W	Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
Anggota	Dharma Nursani	Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
	Reifeldi	Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I
	Rita Berlis	Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II
	R. Ari Widiyanto	Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
	Hermawan	Kepala Subdirektorat Pengelolaan dan Pembinaan LPSE

POSISI	NAMA	JABATAN STRUKTURAL
	Patria Susantosa	Kepala Subdirektorat Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi
	Yulianto Prihandoyo	Kepala Subdirektorat Wilayah I Timur
	Mudjisantosa	Kepala Subdirektorat Wilayah I Barat
	Zulhenny	Kepala Subdirektorat Penanganan Permasalahan Kontrak
	Himawan Giri	Calon Pustakawan
	Gigih Pribadi	Calon Pranata Humas
	Ratna Ayu Maruti	Calon Pranata Humas

8. MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

POSISI	NAMA	JABATAN STRUKTURAL
Koordinator	Salusra Widya	Kepala Perencanaan, Organisasi dan Tata Kerja
Anggota	Hardi Afriansyah	Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi
	Tri Susanto	Pengolah Data Pemantauan

9. QUICK WINS 1 (UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA BERBASIS KOMPUTER)

POSISI	NAMA	JABATAN STRUKTURAL
Koordinator	Gusmelinda Rahmi	Direktur Sertifikasi Profesi
Anggota	Hafiz Ashadi	Kepala Subdirektorat Tata Kelola dan Evaluasi Surveilan
	Suharti	Kepala Subdirektorat Sistem dan Sarana Sertifikasi
	Ari Sulindra	Kepala Seksi Sistem Sertifikasi
	Umi Nuraeni	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

10. QUICK WINS 2 (PENGEMBANGAN SISTEM LAYANAN BIMBINGAN TEKNIS DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG TERINTEGRASI)

POSISI	NAMA	JABATAN STRUKTURAL
Koordinator	Reifeldi	Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I
Anggota	Rita Berlis	Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II
	Yulianto Prihandoyo	Kepala Subdirektorat Wilayah I Timur
	Mudjisantosa	Kepala Subdirektorat Wilayah I Barat
	M Dwi Sumanto	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
	Deasy Rachmawati	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

**KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO